

BAB II

ANALISIS WACANA KRITIS KONSTRUKSI PEMERINTAH DALAM TAYANGAN YOUTUBE “*FERI AMSARI KRITIK PEMERINTAH*”

A. Analisis Tematik Konstruksi Pemerintah dalam Tayangan YouTube *Feri Amsari kritik Pemerintah*

1. Personalisasi Kritik Publik

Moderator (3:05-3:34)

“Anda sudah sebutkan tadi, Anda juga di cap karena Anda aktivis banyak menyampaikan kritik secara terbuka. **Anda, antek asing?**” (D-1)

Narasumber (3:34-3:55)

“Ya karena apa ya antek asing, sekolah di luar negeri tidak menyebabkan saya antek asing pak Habibie juga sekolah di luar negeri Pak Prabowo juga sekolah di luar negeri. **Apa yang menyebabkan saya mereka tuduh antek asing?. Jadi argumentasi ini sekali lagi bagi saya untuk menyerang personal saja.**” (D-2)

Pada data D-1 dan D-2 membahas tentang adanya personalisasi yang muncul ketika kritik terhadap pemerintah tidak lagi diperdebatkan berdasarkan substansi, tetapi berdasarkan identitas individu yang menyampaikan kritik. Moderator mengawali diskusi dengan menyebut pelabelan “*antek asing*” terhadap komunikator yaitu Feri Amsari karena sering menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Selanjutnya Feri Amsari menanggapi tuduhan yang disampaikan tersebut dengan menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan luar negeri tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh seseorang sebagai antek asing. Feri juga memberikan contoh tokoh nasional yang juga memiliki latar belakang pendidikan di luar negeri. Melalui penjelasan tersebut, Feri Amsari

berusaha menunjukkan bahwa tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak memiliki hubungan dengan substansi kritik yang ia sampaikan.

Pada data D-1 secara tematik menunjukkan adanya upaya mengaitkan aktivitas kritik yang dilakukan individu dengan suatu stigma tertentu. Dalam data tersebut terdapat istilah “*antek asing*” yang muncul dari moderator sebagai bentuk pelabelan negatif terhadap pengkritik. Penggunaan label tersebut menunjukkan bahwa Feri Amsari sebagai aktivis serta pengkritik menjadi fokus utama dibandingkan dengan isi dari kritik yang disampaikan. Kritik yang seharusnya diperdebatkan berdasarkan argumen dan data bergeser menjadi persoalan identitas individu. Kondisi tersebut menjadi personalisasi kritik publik dikarenakan perhatian publik diarahkan kepada siapa yang menyampaikan kritik bukan pada isu atau kebijakan yang dikritik.

Selanjutnya, pada data D-2, Feri Amsari secara tematik langsung menafsirkan tuduhan “*antek asing*” sebagai tuduhan serangan personal. Argumentasi yang Feri Amsari sampaikan menunjukkan bahwa label yang diberikan tidak didasarkan pada substansi kritik melainkan mengacu pada permasalahan personal seperti pengalaman pendidikan di luar negeri. Untuk membantah tuduhan tersebut Feri Amsari membandingkannya dengan tokoh lain, seperti B.J Habibie dan Prabowo Subianto. Perbandingan tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa pengalaman pendidikan internasional tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh seseorang memiliki kepentingan asing.

Adanya personalisasi kritik politik berupa pelabelan “*antek asing*” sejalan dengan penelitian Seda (2025) yang menyebutkan bahwa kata “*antek*” sering digunakan untuk menuduh seseorang atau kelompok oposisi sebagai pihak yang mendukung asing dan musuh ideologis. Kata “*antek asing*” memiliki makna dan berfungsi sebagai strategi retorik untuk membentuk citra negatif terhadap lawan politik. Pada data D-1 pelabelan tersebut membentuk persepsi publik mengenai pengkritik terhadap posisi politiknya. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Faruq (2025) yang mengemukakan bahwa penggunaan “*antek asing*” merupakan bagian dari pertarungan wacana politik yang digunakan untuk membangun makna tertentu di ruang publik. Melalui proses tersebut, perhatian publik dapat diarahkan pada identitas pengkritik yang membuat isi dari suatu kritik atau perdebatan menjadi kurang mendapatkan ruang dalam diskusi publik.

Dengan demikian, penggunaan label “*antek asing*” dalam data D-1 dan D-2 menunjukkan adanya upaya personalisasi kritik politik yang dapat menggeser fokus pembahasan dari persoalan kebijakan menjadi beralih mempertanyakan identitas individu yang menyampaikan kritik. Hal tersebut menjadikan pengkritik sebagai objek perdebatan, sementara isi dari suatu kritik menjadi kurang terbahas. Akibatnya, ruang diskusi publik tidak lagi berfokus pada data, argumen atau kebijakan melainkan diisi dengan perdebatan latar belakang pengkritik. Sehingga, personalisasi politik berfungsi untuk memengaruhi perhatian publik terhadap isu yang sedang dibahas.

2. Dugaan Politisasi Kritik Publik

Moderator (25:54-26:00)

“Karena Anda dekat dengan Pak Anies misalnya. Dugaan afiliasi politik itu kemudian juga digunakan atau setidaknya seolah-olah menjadi rasionalisasi sikap anda saat ini menyerang pemerintah karena ada perbedaan politik aja” (D-3)

Narasumber (27:44-27:50)

“Misalnya yang heboh soal beras dan dikaitkan dengan Pak Anies yaitu soal halal bihalal kemarin sebagian pakar diundang tidak hanya saya dan diajak oleh mas novel Baswedan sepupunya mas anies... dan kami datang sebentar saja, tapi kami sadar betul semua orang bisa menggunakan foto video dalam pertemuan halal bihalal itu untuk mereduksi pernyataan kami.” (D-4)

Data pada D-3 dan D-4 membahas adanya dugaan politisasi kritik publik yang terjadi ketika kritik terhadap pemerintah tidak lagi dipahami sebagai bentuk evaluasi namun dikaitkan dengan dugaan afiliasi politik pengkritik. Dalam data D-3, moderator menjelaskan bahwa kritik yang disampaikan Feri Amsari muncul karena kedekatannya tokoh politik lain yaitu Anies Baswedan. Selanjutnya, pada data D-4 komunikator menjelaskan bahwa kehadirannya dalam acara halal bihalal yang dihadiri olehnya merupakan ajakan dari Novel Baswedan yang kemudian dihadiri juga oleh para tokoh lainnya. Kehadiran tersebut kemudian dikaitkan kedekatan dirinya dengan salah satu tokoh politik yaitu Anies Baswedan. Ia menyampaikan bahwa foto dan video pertemuan tersebut berpotensi digunakan untuk membangun persepsi bahwa kritik yang selama ini ia sampaikan memiliki kepentingan politik tertentu. Padahal, kehadirannya dalam acara tersebut tidak ada kaitannya dengan keberpihakannya terhadap tokoh politik tertentu.

Berdasarkan hasil temuan data di atas, data D-3 menunjukkan adanya upaya menghubungkan kritik yang disampaikan Feri Amsari dengan dugaan afiliasi politik. Kritik terhadap pemerintah tidak dipahami sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan yang sedang berjalan melainkan ditafsirkan sebagai konsekuensi dari perbedaan posisi politik. Kritik yang muncul menjadi kehilangan sifatnya sebagai kontrol sosial dan perhatian publik berpotensi bergeser dari isi kritik menuju dugaan motif politik yang melatarbelakangi pengkritik.

Selanjutnya, pada data D-4 memperlihatkan bagaimana dugaan politisasi itu muncul melalui aktivitas sosial yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan substansi kritik yang dapat digunakan untuk membangun persepsi mengenai keberpihakan politik seseorang. Dalam kutipan tersebut, Feri Amsari pada acara halal bihalal dikaitkan dengan figur Anies Baswedan kemudian berpotensi memunculkan anggapan bahwa kritik yang disampaikannya memiliki kepentingan tertentu. Feri Amsari juga menunjukkan kesadaran bahwa dokumentasi berupa foto atau video dari pertemuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggeser perhatian publik. Sehingga, isu utama mengenai kritik tentang beras yang semula menjadi fokus utama berpotensi tergantikan oleh perdebatan mengenai kedekatan pengkritik terhadap tokoh politik tersebut.

Dalam kutipan data di atas, secara tematik kritik terhadap pemerintah dikaitkan dengan dugaan keberpihakan politik pengkritik yang dilakukan bukan semata-mata evaluasi pada kebijakan. Dengan menggunakan kedekatan pada tokoh politik tertentu, dalam hal ini yaitu

Anies Baswedan. Anies baswedan sebelumnya merupakan lawan politik yang cukup kuat sehingga apabila pengkritik tersangkut dengan nama-nama lawan politik dugaan mengenai afiliasi bisa saja tumbuh pada masyarakat, situasi tersebut menjadikan momen untuk menjelaskan atau merasionalisasi kritik yang meningkat terhadap pemerintah.

Kritik terhadap pemerintah pada data D-4 dan D-5 tidak hanya dipahami sebagai evaluasi terhadap kebijakan melainkan dikaitkan dengan afiliasi tertentu. Pengkritik dihubungkan dengan tokoh politik seperti Anies Baswedan yang sebelumnya menjadi lawan politik pemerintah dan berpotensi dipersepsikan sebagai bagian dari kepentingan politik tertentu, bukan sebagai bentuk kontrol demokratis terhadap kebijakan. Hal tersebut menunjukkan adanya kecenderungan polarisasi politik yang membuat fokus diskusi publik dapat bergeser dari substansi kritik beralih menjadi kritik identitas politik pada pihak yang menyampaikan kritik. Hal ini berpengaruh pada ruang musyawarah mengenai kebijakan semakin terbatas (Nashrullah, 2023 dalam Masykuri & Ramdhan, 2021).

Sejalan dengan penelitian Muhdiarta (2018) yang menjelaskan bahwa tujuan politisasi adalah memastikan agenda dan kepentingan politik penguasa dapat berjalan tanpa hambatan melalui kontrol terhadap institusi publik. Kontrol dalam penelitian ini dikaitkan dengan kontruksi wacana yang berupaya mendelegitimasi kritik. Kritik yang seharusnya berfungsi sebagai sarana koreksi kebijakan direduksi menjadi tindakan oposisi politik yang di mana masyarakat diarahkan untuk memandang pengkritik

sebagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu, bukan sebagai warga yang menjalankan pengawasan terhadap pemerintah.

Rahmat dan Marut (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dinamika politik menjelang pemilu 2024 di Indonesia ditandai oleh kuatnya pertarungan identitas dan afiliasi politik sehingga perhatian publik sering kali lebih terfokus pada aktor yang menyampaikan pesan dibandingkan substansi pesan itu sendiri. Kondisi tersebut tampak pada data D-4 dan D-5, ketika kritik Feri Amsari terhadap kebijakan pemerintah dikaitkan dengan kedekatannya dengan Anies Baswedan. Akibatnya, perdebatan yang semula berkaitan dengan kebijakan publik bergeser menjadi pembahasan mengenai dugaan keberpihakan politik pengkritik. Kritik tidak lagi diposisikan sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan melainkan sebagai kepentingan politik tertentu.

3. Kompetensi Kepemimpinan

Narasumber (13:12-13:25)

“Faktornya ada tiga. **Prabowo, Prabowo, Prabowo**. Maksudnya, **Prabowo tidak paham konstitusi**. Ini menurut saya presiden tidak paham konsep-konsep tanggung jawab seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Tidak memahami konstitusi pak Prabowo.” (D-5)

Narasumber (17:10-17:30)

“**Pak presiden tidak mengerti soal perencanaan undang-undang dengan baik. Itu sebabnya tiba-tiba undang-undang di buat disesuaikan**. Itu kan cara berpikir otoritarian. Pokoknya saya buat kebijakan ini, undang-undangnya harus menyesuaikan. Tidak bisa begitu. Karena kekuasaan itu sifatnya menyimpang jadi dia yang harus taat undang-undang supaya terbatas.” (D-6)

Kutipan dalam data D-5 dan D-6 membahas mengenai kompetensi kepemimpinan presiden dalam menjalankan pemerintahan terkait dengan pemahaman pada konstitusi dan tata kelola negara. dalam data D-5,

komunikator menilai bahwa Presiden Prabowo belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konstitusi serta tanggung jawab presiden sebagai kepala Pemerintahan. Selanjutnya, pada D-6 komunikator mengkritik cara pemerintah dalam menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak berlandaskan pada mekanisme perencanaan yang semestinya karena menurut komunikator undang-undang tidak disesuaikan begitu saja sebagai pemegang kekuasaan harusnya dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

Data D-5 menunjukkan bahwa komunikator mengonstruksikan kompetensi kepemimpinan sebagai kemampuan seorang presiden untuk memahami konstitusi serta menjalankan kewenangan sesuai dengan batas-batas yang sudah ditentukan oleh hukum. Melalui pernyataan "*Prabowo tidak paham konstitusi*" komunikator menempatkan pengetahuan mengenai konstitusi sebagai indikator utama dalam menilai kualitas kepemimpinan. Kritik yang disampaikan komunikator mengarahkan kapasitas seorang pemimpin bukan dilihat dari kebijakan yang dihasilkan.

Data pada D-5 kemudian diperkuat dengan data D-6 secara tematik memuat tentang konstruksi kompetensi kepemimpinan. Dengan menyoroti penyusunan kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Komunikator menilai bahwa pemerintahan lenih mengutamakan penyesuaian aturan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daripada menyusun kebijakan berdasarkan kerangka hukum yang sudah ada. Hal tersebut terlihat melalui pernyataan "*Pokoknya saya buat kebijakan ini. Undang-undang harus menyesuaikan*" kutipan tersebut

menunjukkan bahwa pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya tidak menganut pada peraturan perundang-undangan karena undang-undang harus menyesuaikan kebijakan yang dibuat. Sehingga, komunikator membangun representasi bahwa pemimpin lemah dalam memahami hukum dan perencanaan negara yang berpotensi menghasilkan praktik kekuasaan yang berpusat atau berfokus pada kehendak pemimpin.

Penonjolan tema lemahnya kompetensi kepemimpinan berfungsi sebagai konstruksi mengenai watak kekuasaan yang dinilai otoritarian. Dalam perspektif van Dijk, wacana ini mengkonstruksikan pemerintah sebagai rezim yang mempraktikkan tindakan tidak profesional. Temuan data di atas, sejalan dengan pandangan bahwa kompetensi kepemimpinan merupakan salah satu unsur penting dalam menyelenggarakan pemerintah. Menurut Northouse (2022), kompetensi pemimpin mencakup pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk seorang pemimpin dalam menjalankan tugas serta mengambil keputusan secara efektif. Pemahaman mengenai konstitusi dan sistem hukum menjadi bagian penting dari kompetensi kepemimpinan karena setiap kebijakan yang dibuat harus mengikuti aturan yang berlaku. Temuan tersebut juga selaras dengan penelitian Santoso (2017) yang berpendapat bahwa pemimpin dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk memilih prioritas kebijakan, serta memimpin negara agar tetap tegak dan kokoh menuju tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Dalam hal ini kualitas kepemimpinan dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam menempatkan hukum sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikator mengkonstruksikan kompetensi kepemimpinan sebagai kemampuan pemimpin dalam memahami konstitusi, mampu menjalankan kewenangan sesuai dengan hukum yang berlaku serta menyusun kebijakan berdasarkan perencanaan yang sudah ditetapkan.

4. Kepentingan Politik dalam Pemerintahan

Narasumber (15:04-15:10)

“Kedua, Pak Prabowo terlalu merasa hutang jasa sehingga seluruh orang yang berjasa bagi kemenangannya ditarik masuk pemerintahan. Itu sebabnya setengah dari **Menteri kabinetnya Pak Joko Widodo Menteri-menteri utamannya masuk ke dalam kabinet ini 50%.**” (D-7)

Narasumber (15:34-15:37)

“**Jadi Pak Prabowo tidak sadar bahwa pekerjaan memenangkannya selain pekerjaan kepentingan politik partai dan koalisinya juga pekerjaan kebangsaan.** Kalau kemudian dimasukkan dalam jabatan-jabatan penting ini dari buzzer sampai yang lain-lainnya itu negara akan berdampak” (D-8)

Kutipan dalam data D-7 dan D-8 membahas mengenai adanya kepentingan politik dalam pemerintahan. Komunikator memberikan argumen mengenai kabinet yang ada dalam pemerintahan Pak Prabowo dan menilai bahwa presiden memasukkan banyak individu ke dalam pemerintahan karena adanya hubungan politik balas jasa. Komunikator juga mengaitkan bahwa komposisi kabinet dengan faktor kedekatan politik. Beberapa kabinet dalam pemerintahan Pak Prabowo diisi oleh orang-orang yang pernah berjasa bagi kemenangan presiden salah satunya yaitu menteri-menteri dari Pak Joko Widodo. Selanjutnya komunikator menekankan bahwa selain posisi kabinet yang diisi oleh orang-orang yang berjasa atas kemenangannya, kabinet tersebut juga merupakan pekerjaan

kebangsaan yang tidak boleh diisikan oleh individu yang tidak berkompeten di bidangnya. Apabila kemudian memasukkan individu yang kurang berkompeten di bidangnya maka negara akan berdampak.

Pada temuan D-7 dapat diketahui bahwa komunikator mengkonstruksi pembentukan kabinet didasarkan pada kepentingan politik dalam pemerintahan. Pembentukan kabinet tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan pemerintahan atau kompetensi melainkan dipengaruhi hubungan politik pemerintahan. Hal tersebut tampak dalam kutipan *“terlalu merasa hutang jasa”* yang mengkonstruksikan hubungan timbal balik antar kekuasaan. Selanjutnya terdapat kutipan *“menteri kabinetnya Pak Joko Widodo, menteri-menteri utamanya masuk dalam kabinet ini 50%”* memperlihatkan bahwa kepentingan politik memiliki pengaruh cukup besar dalam proses penyusunan kabinet. Sehingga, keputusan politik dalam pemerintahan tidak sepenuhnya berorientasi pada tata kelola dengan mengambil individu sesuai dengan kualitasnya melainkan diambil melalui hubungan politik balas jasa.

Selanjutnya temuan pada D-8 dapat diketahui bahwa akibat dari hutang jasa atas kemenangan Presiden Prabowo, apabila individu-individu yang membantu dalam kemenangan tersebut dimasukkan dalam susunan kabinet namun tidak sesuai dengan keahliannya maka, yang berdampak besar adalah negara. karena sudah memilih individu yang tidak berkompeten di bidangnya. Komunikator mengatakan bahwa prabowo tidak sadar akan hal tersebut hanya berfokus pada hutang jasa yang

kemudian tidak memperhatikan fungsi dari susunan kabinet yang sebenarnya.

Analisis makro-tematik memperlihatkan bahwa narasumber mengkonstruksikan pembentukan kabinet negara tidak berjalan atas dasar kompetensi keilmuan. Data tersebut menunjukkan bahwa komunikator percaya relasi hutang politik mempengaruhi pembentukan kabinet. Terdapat kewajiban politik untuk memberikan posisi kepada kelompok yang mendukung kemenangan pemimpin melalui frasa "*hutang jasa*". Selain itu, kalimat "*ditarik masuk pemerintahan*" menunjukkan bahwa jabatan publik dianggap sebagai kompensasi politik, bukan hasil seleksi yang terstruktur (Mutawalli, et al. 2023).

Pengisian jabatan yang dipengaruhi oleh loyalitas politik daripada kapasitas individu, kondisi tersebut berpotensi menurunkan efektivitas pemerintahan karena posisi tidak sepenuhnya ditempati oleh individu yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengelola negara (Rosyan & Prasajo, 2024). Melalui tematik kepentingan politik ini, narasumber membangun konstruksi bahwa kabinet nasional tidak sepenuhnya berorientasi pada kepentingan bersama, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan koalisi. Birokrasi atas dasar balas budi politik akan merusak efektivitas kinerja negara dan mengorbankan masa depan negara.

5. Perencanaan Kebijakan Pemerintah

Narasumber (16:08-16:20)

“Pak Prabowo sendiri sebagai kepala pemerintah, **dia tidak mampu mengevaluasi kinerja timnya karena mungkin dia tidak tahu apa yang sedang ia kerjakan.** Dia tidak mengerti.” (D-9)

Narasumber (16:26-16:40)

“Seorang presiden tidak bisa dan tidak boleh membuat **program dadakan tanpa berpijak kepada perencanaan yang terdapat di rencana Pembangunan nasional** baik jangka menengah maupun jangka panjang. Contohnya tiba-tiba **gentengisasi.**” (D-10)

Kutipan dalam data D-9 dan D-10 komunikator membahas mengenai hubungan antara kemampuan presiden dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan dengan proses perencanaan kebijakan yang dijalankan. Ia berpendapat bahwa seorang presiden harus memahami arah dari suatu kebijakan serta mampu mengevaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan oleh timnya. Komunikator menekankan bahwa setiap kebijakan harus disusun berdasarkan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia kemudian mengkritik munculnya program dadakan yang tidak memiliki keterkaitan jelas dengan rencana pembangunan nasional. Hal tersebut diperkuat dengan contoh nyata yang diberikan oleh komunikator yaitu melalui kutipan “*Contohnya tiba-tiba gentengisasi*”.

Pada temuan data D-9 secara tematik menunjukkan bahwa komunikator mengkonstruksikan bahwa presiden tidak mampu mengevaluasi kinerja timnya yang berpengaruh pada perencanaan kebijakan. Komunikator menyoroti pentingnya peran seorang kepala pemerintahan dalam memastikan bahwa seluruh anggota kabinet bekerja sesuai dengan tugas dan tujuan pemerintahan. Terdapat kutipan “*dia tidak*

mampu mengevaluasi kinerja timnya”, komunikator mengkonstruksikan bahwa “*dia*” yang dimaksud dengan presiden tidak mampu memastikan kinerja timnya dengan baik. Selanjutnya, pernyataan “*karena mungkin dia tidak tahu apa yang sedang ia kerjakan*” memperkuat kritik tersebut dengan menghubungkan lemahnya evaluasi kinerja dan kurangnya pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintahan. Hal tersebut berdampak pada pengelolaan perencanaan pemerintah menjadi tidak efisien.

Pada temuan data D-10 secara tematik menunjukkan bahwa komunikator mengonstruksikan perencanaan kebijakan sebagai landasan utama dalam pemerintahan. Hal tersebut terlihat dalam kutipan “*Seorang presiden tidak bisa dan tidak boleh membuat program dadakan tanpa berpijak kepada perencanaan yang terdapat di rencana Pembangunan nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang.*” Komunikator menekankan pentingnya perencanaan dalam pemerintahan melalui pernyataan bahwa seorang presiden tidak dapat membuat program secara tiba-tiba tanpa mengacu pada rencana pembangunan nasional agar sistem pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan rencana tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perencanaan menjadi suatu hal yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintahan berjalan dengan baik.

Dalam wacana, muncul juga adanya persepsi bahwa kebijakan tanpa hubungan yang jelas dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka Panjang. Contohnya dalam kutipan seperti “*program dadakan*” dan kebijakan “*gentengisasi*”. Dalam situasi tersebut,

perencanaan dianggap sebagai alat penting yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap kebijakan memiliki dasar, tujuan, dan jalan yang jelas. Sehingga, kritik yang terdapat dalam wacana menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan tidak hanya diukur dari hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dari seberapa sistematis kebijakan tersebut disusun.

Kebijakan publik dan sistem perencanaan pembangunan nasional harus konsisten. Pemerintah dibangun melalui wacana yang mempertanyakan kesesuaian antara program yang dijalankan dengan mekanisme perencanaan yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat Frasa “*tidak mampu mengevaluasi kinerja timnya*” menunjukkan kekurangan koordinasi dan kontrol terhadap kabinet. Selain itu, pernyataan mengenai “*program dadakan*” juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah nampak muncul tanpa perencanaan yang matang. Padahal, perencanaan pembangunan nasional merupakan proses penyusunan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian (Muallif, 2023). Menurut perspektif *good governance*, kualitas penyelenggara pemerintah sangat ditentukan oleh konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Ketidaksesuaian antara program pemerintah dan perencanaan dapat mencerminkan lemahnya tata kelola karena kebijakan berpotensi kehilangan arah Pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Arwanto & Anggraini, 2022). Munculnya kebijakan yang bersifat spontan atau tidak terencana menimbulkan kritik terhadap

pemerintah dalam menjaga konsistensi perencanaan Pembangunan (Widowati, et al. 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikator mengkonstruksikan pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan perencanaan kebijakan pemerintah dengan berdasar pada rencana pembangunan Nasional. Pemerintah dianggap memiliki kelemahan dalam evaluasi dan pengendalian kebijakan sehingga program yang dijalankan tidak terhubung dengan jelas maksud dan tujuannya.

6. Transparansi Kebijakan Publik

Narasumber (9:20-9:25)

“Yang membuat saya terluka dengan teman-teman adalah **Negara tidak memberikan data yang benar** agar rakyatnya tercerdaskan.” (D-11)

Narasumber (9:38-9:45)

“**Bukan hanya sekedar 800 ribu rawa kita jadikan sawah, tapi tidak diikuti data.** Sawah dimana, provinsi dimana, kabupatennya mana, supaya kita bisa cross check benarkah data itu.” (D-12)

Narasumber (10:36-10:50)

“Kok kita swasembada beras, **tapi kenapa kita impor beras dari Amerika gara-gara ART (Perjanjian timbal balik dagang)? Apa alasannya? kata negara karena itu beras elit.** Se elit-elitnya lidah di Indonesia, lidah mereka untuk beras lidah kampung. Kalau tidak beras solo, beras jawa barat itu yang wangi-wangi. Jadi, nggak ada beras amerika yang seelit itu, yang karena alasan itu untuk diimpor ke Indonesia.” (D-13)

Kutipan dalam data D-11, D-12, dan D-13 komunikator membahas persoalan transparansi kebijakan publik dalam menyampaikan data dan alasan yang digunakan pemerintah untuk mendukung suatu kebijakan. Pada data D-11 komunikator menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap pemerintah karena dinilai

tidak memberikan data yang benar pada masyarakat. Dari data tersebut komunikator juga berharap bahwa pemerintah dapat memberikan data yang benar supaya rakyat dapat tercedaskan.

Selanjutnya, pada kutipan D-12, berisi kritik komunikator yang membahas mengenai program pembangunan sawah yang tidak dijelaskan secara rinci. Komunikator kemudian mempertanyakan lokasi, jumlah, serta rincian data lainnya supaya dapat digunakan masyarakat untuk verifikasi kebenaran data tersebut. Selanjutnya pada D-13 komunikator membahas mengenai swasembada beras yang saat ini negara Indonesia sedang lakukan. Namun, komunikator mempertanyakan apa alasan impor beras dari Negara Amerika disaat negara kita sedang swasembada beras. Hal tersebut menjadikan satu tanda tanya baginya. Selanjutnya komunikator memberikan pertanyaan mengenai ketidaktransparan data tersebut dengan kutipan “*gara-gara ART (perjanjian timbal balik dagang)? Apa alasannya?*” lalu diperkuat dengan kutipan “*kata negara karena beras elit*” yang kemudian komunikator menampilkan perbandingan antara beras impor dengan beras yang biasa masyarakat indonesia gunakan sehari-hari sebagai penguat argumen yang diberikan.

Pada temuan data data D-11 secara tematik, menunjukkan kritik terhadap pemerintah yang dianggap belum memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat. Pada data tersebut, persoalan utama yang disoroti bukan sekadar keberadaan suatu kebijakan, melainkan kualitas informasi yang menyertai kebijakan tersebut. Feri Amsari

menempatkan data sebagai instrumen penting yang memungkinkan masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya dan melakukan penilaian secara rasional terhadap kebijakan pemerintah. Pernyataan *“negara tidak memberikan data yang benar”* menunjukkan adanya anggapan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan publik akan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya keterbukaan informasi dalam sistem kebijakan pemerintahan. Data dianggap sebagai alat penting yang memungkinkan masyarakat memahami dan menilai kebijakan secara rasional. Informasi yang akurat dianggap tidak hanya sebagai kumpulan data saja, tetapi juga sebagai sarana untuk membantu membangun pemahaman publik tentang kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, masalahnya bukan hanya adanya kebijakan melainkan bagaimana masyarakat dapat memahami dan bertanggung jawab atas kebijakan tersebut dengan transparansi data yang memadai.

Data D-12 secara tematik menunjukkan masalah yang sama melalui tuntutan informasi yang lebih rinci dan dapat diverifikasi oleh publik. Pernyataan tentang program pengembangan sawah menunjukkan bahwa klaim pemerintah memerlukan data yang lebih spesifik agar publik dapat memverifikasi kebenaran mereka. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan pemerintah adalah dengan menyebutkan lokasi, wilayah, dan detail implementasi kebijakan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berarti keterbukaan dalam komunikasi informasi, tetapi

juga menyediakan data yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan proses verifikasi.

Sementara itu, data D-13 secara tematik menunjukkan bahwa argumen yang digunakan untuk menjelaskan suatu kebijakan sangat diperhatikan. Komunikator mempertanyakan hubungan antara swasembada beras dan kebijakan impor beras dari Amerika Serikat yang dilakukan oleh pemerintah dan kritik utama tertuju pada penjelasan pemerintah tentang kebijakan tersebut. Terdapat kutipan “*gara-gara ART (perjanjian timbal balik dagang)? Apa alasannya?*” komunikator berharap agar pemerintah memberikan transparansi kebijakan yang pemerintah lakukan dengan alasan yang jelas, dapat dipahami serta dapat diuji oleh publik kebenarannya.

Dari paparan temuan di atas dapat dipahami bahwa kritik yang disampaikan pada pernyataan “*negara tidak memberikan data yang benar agar rakyatnya tercerdaskan*” pada data D-11 menunjukkan transparansi informasi diposisikan sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis. Pada kutipan tersebut, data tidak hanya dianggap sebagai persyaratan administratif pemerintah tetapi juga sebagai alat yang memungkinkan masyarakat memahami, menilai, dan mengawasi kebijakan dengan logika. Kritik narasumber menggambarkan pemerintah sebagai pihak yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik. Sebab informasi yang diberikan belum mampu mendukung proses pemahaman publik yang objektif terhadap kebijakan pemerintah. Pentingnya transparansi

sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintahan ditunjukkan oleh tuntutan terhadap ketersediaan data yang akurat, karena masyarakat dapat mengawasi kebijakan pemerintah (Sudrajat, 2021)

Selanjutnya pada kutipan *"bukan hanya sekedar 800 ribu rawa kita jadikan sawah, tapi tidak diikuti data"* digunakan untuk mengkonstruksikan pemerintah sebagai institusi yang tidak transparan. Kutipan *"Sawah di mana, provinsi di mana, kabupatennya mana supaya kita bisa cross check"* pada D-12 menunjukkan tuntutan agar pemerintah tidak hanya membuat klaim keberhasilan tetapi juga memberikan data rinci yang dapat dipercaya kepada publik. Transparansi tersebut didefinisikan sebagai penyediaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengawasi dan mengkritik kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (Muhammad & Suharto, 2024). Sehingga, dengan adanya transparansi kebijakan masyarakat dapat lebih kritis dalam menyikapi dan mengawasi proses kebijakan yang pemerintah buat. Selanjutnya pada D-13 terdapat kutipan *"kok kita swasembada beras, tapi kenapa kita impor beras dari Amerika Serikat?"* yang mempertanyakan konsistensi antara narasi swasembada beras dan kebijakan impor yang dilakukan. Melalui kedua kutipan tersebut, pemerintah dikonstruksikan sebagai aktor yang dipersoalkan dari aspek transparansi kebijakan karena informasi yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya didukung oleh data dan argumentasi yang konsisten, sehingga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah (Randhona & Fitriarsi, 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan data pada kutipan D-11, D-12, dan D-13 komunikator mengonstruksikan bahwa pemerintah belum sepenuhnya transparan dalam menyampaikan informasi pada publik. Kritik yang muncul dalam ketiga data tersebut memperlihatkan transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan data, tetapi berkaitan dengan argumentasi yang disampaikan oleh pemerintah dalam menjelaskan suatu kebijakan. Ketika data serta penjelasan yang diberikan kurang memadai, masyarakat dan para pengkritik berpotensi mempertanyakan konsistensi serta rasionlitas kebijakan yang pemerintah jalankan.

B. Analisis Skematik pada Tayangan YouTube *Feri Amsari kritik Pemerintah*

1. Pendahuluan

P-1 (3:05-3:30)

“Bang Feri, selain tadi Anda dan sosok-sosok lain dicap sebagai pembenci pemerintah gitu, karena memang itu definisi memang dituliskan pembenci pemerintah oleh sejumlah pihak yang mempertanyakan dan mencoba untuk mengkritik sikap-sikap Anda selama ini Anda sudah sebutkan tadi, anda juga di cap karena anda aktivis banyak menyampaikan kritik secara terbuka. Anda, antek asing?”

Berdasarkan sajian informasi, tayangan *Feri Amsari kritik pemerintah* diawali dengan pertanyaan pembuka yang dilontarkan oleh moderator. Dalam pendahuluan teks tersebut komunikator membangun tema awal wacana dengan memperkenalkan pelabelan negatif terhadap pihak pengkritik pemerintah melalui diksi “*pembenci pemerintah*” dan “*antek asing*” kepada aktivis atau individu yang kontra dengan pemerintah. Melalui pengantar ini, komunikator mengarahkan perhatian pada isu delegitimasi kritik serta konstruksi citra negatif terhadap kelompok oposisi atau pengkritik

pemerintah. Pada tahap pendahuluan, isu pelabelan sengaja ditempatkan sebagai fokus utama agar audiens memahami perdebatan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Pada awal tayangan, kritik terhadap pemerintah tidak ditempatkan sebagai persoalan substansi kebijakan semata, melainkan juga sebagai persoalan bagaimana kritik tersebut diterima dan direspons dalam ruang publik.

2. Isi

I-1 (10:27-11:25)

“Tolong Pak Menteri Pertanian kasih data yang lebih mampu menjelaskan kepada publik. Misalnya negara selalu “Kok kita swasembada beras, tapi kenapa kita impor beras dari Amerika gara-gara ART (Perjanjian timbal balik dagang)? Apa alasannya? kata negara karena itu beras elit. Main bodoh-bodohan aja ya, se-elit apa beras amerika dan itu dinikmati lidah orang Indonesia yang paling elit di Indonesia. Se elit-elitnya lidah di Indonesia, lidah mereka untuk beras lidah kampung. Kalau tidak beras solo, beras jawa barat itu yang wangi-wangi. Jadi, nggak ada beras amerika yang seelit itu, yang karena alasan itu untuk diimpor ke Indonesia.”

Pada bagian Isi 1, komunikator menunjukkan argumen kritik terhadap kebijakan pangan pemerintah, khususnya klaim swasembada beras yang dinilai tidak sejalan dengan praktik impor beras dari Amerika Serikat. Dalam isi bagian 1 ini, Feri Amsari mempertanyakan alasan pemerintah yang tetap melakukan beras ketika negara telah mencapai swasembada pangan dalam hal ini yaitu beras. Pertanyaan tersebut menunjukkan adanya keraguan terhadap konsistensi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Pada bagian ini, Feri Amsari juga mengkritik alasan pemerintah menyebut beras impor dari Amerika sebagai “*beras elit*”. Ia menggunakan ungkapan “*main bodoh-bodohan aja ya*” untuk menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap alasan tersebut. Menurutnya, alasan tersebut sulit diterima karena masyarakat Indonesia pada umumnya lebih familiar dengan jenis beras lokal yang sesuai

dengan selera konsumsi sehari-hari. Untuk memperkuat argumennya Feri Amsari membandingkan kualitas beras amerika dengan beras lokal yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia. Melalui cara tersebut, ia berusaha menunjukkan bahwa alasan impor yang disampaikan oleh pemerintah belum cukup kuat untuk menjawab pertanyaan publik.

I-2 (14:13-15:05)

“Tadi saya sampaikan penelitian kami di 2014 menyebutkan Indonesia hanya butuh 21 menteri. Nggak perlu sebanyak itu. Amerika, Mbak Fristian, negerinya lebih luas daratannya. Punya rata-rata 15 sampai 21 menteri. Sangat luas daratannya dan urusannya maha luas campur tangan urusan negara lain. Tapi Cuma segitu menterinya. Saya bukan mengatakan Indonesia bukan negara besar tapi kok terlalu banyak. 109 itu berlebihan.”
“Ini menurut saya presiden tidak paham konsep-konsep tanggung jawab seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Tidak memahami konstitusi pak Prabowo.”

Selanjutnya, bagian isi 2. Pada bagian isi ini, menunjukkan kritik terhadap struktur kabinet pemerintahan yang dianggap terlalu besar dan kurang efisien. Feri Amsari menilai jumlah menteri dan pejabat dalam pemerintahan tidak sebanding dengan kebutuhan penyelenggaraan negara. Untuk memperkuat argumennya, ia membandingkan Indonesia dengan Amerika yang memiliki wilayah dan urusan pemerintahan yang lebih luas, namun dalam pengelolaan menterinnya justru lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Melalui perbandingan tersebut Feri Amsari berupaya menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan tidak ditentukan oleh banyaknya jabatan, melainkan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan secara tepat dan efisien. Pada bagian ini, Feri Amsari juga mengaitkan persoalan-persoalan sebelumnya dengan kapasitas presiden dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ia

menilai keputusan dalam menyusun kabinet mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan konstitusi. Kritik yang disampaikan tidak hanya menyoroti jumlah pejabat yang dianggap berlebihan namun juga mempertanyakan kualitas kepemimpinan pemerintahan dalam menjalankan kewenangan negara.

3. Penutup

PT-1 (23:59-24:55)

“Demi kekuasaan yang sedang dekat dengan Anda. Anda lupa, anda tidak boleh merusak tata Kelola ini semua. Karena begitu tata Kelola ini semua rusak, tidak hanya rakyat yang menderita mungkin anda dan keluarga anda akan merasakan dampak dari kerusakan ini. Ini negeri kita bersama. Ini bukan negeri orang lain, ini bukan Singapura, ini bukan Malaysia. Ini sepenuh-penuhnya negeri kita mau lari kemana kita?. Pertanyaan saya, untuk apa kita melawan mereka yang berkuasa ini? toh kita enggak bisa lari-lari ke mana juga? Ini tetap rumah dan tempat tinggal kita pulang. Emang mau lari ke mana? Yang ada, rendang yang lebih enak daripada Indonesia. Ini rumah pulang, ini rumah kita dan tugas kita seburuk-buruknya kondisi, mempertahankan.”

Terakhir, pada bagian penutup, menunjukkan ajakan moral untuk menjaga tata kelola negara dan menggunakan kekuasaan secara tanggung jawab. Dalam kutipan penutup tersebut, Feri Amsari mengingatkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang memiliki kekuasaan akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kerusakan tata kelola pemerintahan tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga dapat berdampak kepada pihak yang sedang memegang kekuasaan dan keluarganya. Feri Amsari juga membangun pandangan bahwa kekuasaan seharusnya dijalankan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Berdasarkan dimensi superstruktur model Teun A. van Dijk, tayangan podcast *Feri Amsari Kritik Pemerintah* memiliki skematik wacana yang terstruktur dalam tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pendahuluan memuat pembahasan mengenai pelabelan negatif yang diterima narasumber. Bagian isi memuat pembahasan mengenai data pangan dan persoalan birokrasi yang menjadi objek kritik. Sementara itu, bagian penutup berisi pesan dan imbauan moral kepada masyarakat dan pemerintah.

Susunan wacana tersebut tidak disajikan secara acak, namun disusun secara sistematis untuk membangun pemahaman audiens terhadap isu yang dibahas. Melalui tahapan tersebut, pembicara mengarahkan perhatian audiens dari isu pelabelan pribadi menuju pembahasan substansi masalah, kemudian menutupnya dengan pesan moral yang memperkuat argumentasi yang telah disampaikan.

Berdasarkan data yang ditemukan, struktur wacana dalam tayangan *Feri Amsari kritik pemerintah* disusun melalui tiga bagian utama yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan moderator membuka diskusi dengan mengangkat isu pelabelan terhadap pengkritik pemerintah melalui istilah “*pembenci pemerintah*” dan “*antek asing*”. Penempatan isu tersebut pada bagian awal menunjukkan upaya membangun kerangka interpretasi yang akan menjadi landasan pembahasan selanjutnya. Pada bagian pembuka berfungsi mengarahkan perhatian khalayak terhadap tema utama yang dianggap penting dalam wacana. Melalui pengantar tersebut, kritik terhadap pemerintah sejak awal ditempatkan dengan citra yang kurang baik yang sering mengarahkan kritiknya pada individu pengkritik atau

dengan dengan kata lain menyerang personal, sehingga audiens diarahkan untuk memahami bahwa kritik yang muncul tidak selalu diterima sebagai bagian dari kontrol demokratis, melainkan sering dikaitkan dengan identitas atau kepentingan politik tertentu. Adanya pelabelan dalam tayangan tersebut juga menunjukkan bahwa politik masih menjadi strategi yang digunakan dalam kontestasi wacana publik untuk memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pihak yang menyampaikan kritik (Masykuri & Ramdlan, 2021).

Pada bagian isi, komunikator mengembangkan argumen secara bertahap dengan menyajikan berbagai bentuk kritik terhadap pemerintah, persoalan transparansi data kebijakan pangan, hingga kritik terhadap tata kelola pemerintahan dan kapasitas kepemimpinan presiden. Penyusunan argumen tersebut menunjukkan bahwa bagian isi menjadi ruang utama bagi komunikator untuk membangun representasi pemerintah sebagai institusi yang dinilai memiliki sejumlah kelemahan dalam aspek transparansi, efektivitas birokrasi, dan pengambilan kebijakan. Struktur isi yang disusun melalui rangkaian argumen, data pembandingan, dan contoh empiris menunjukkan karakteristik wacana kritik politik yang bertujuan mempersoalkan kebijakan sekaligus mendorong evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Sari & Nugroho, 2023). Dalam data tersebut terdapat rangkaian argumen serta kritik mengenai impor beras di tengah narasi swasembada pangan yang dikemudian digunakan sebagai alat untuk mempertanyakan konsistensi kebijakan dan kredibilitas informasi yang disampaikan oleh pemerintah.

Selanjutnya, pada bagian penutup bagian penutup tidak lagi berfokus pada kritik terhadap kebijakan tertentu, melainkan mengarahkan diskusi pada pesan moral mengenai pentingnya menjaga tata kelola negara. Pernyataan seperti “*ini rumah kita*” dan “*tugas kita mempertahankan*” menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan sebelumnya dibingkai sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa, bukan sebagai upaya menjatuhkan pemerintah. Penutup berfungsi memberikan kesimpulan sekaligus memperkuat pesan utama yang ingin disampaikan komunikator.

C. Analisis Struktur Mikro (Semantik, Sintaksis, Stilistika, dan Retoris) pada Tayangan YouTube *Feri Amsari kritik Pemerintah*

1. Semantik

a. Latar

L-1 (3:21-3:30)

“Anda juga di cap karena Anda aktivis banyak menyampaikan kritik secara terbuka. Anda, antek asing?”

Pada data L-1 membahas latar sosial yang melatarbelakangi munculnya diskusi mengenai kritik terhadap pemerintah. Moderator menjelaskan bahwa Feri Amsari sebagai aktivis yang sering menyampaikan kritik secara terbuka sehingga memperoleh cap atau label tertentu. Pertanyaan “*Anda, antek asing?*” menunjukkan tuduhan yang telah berkembang menjadi isu dan melekat pada diri pengkritik pemerintah. Sehingga, data tersebut tidak secara langsung membahas substansi melainkan memperkenalkan terlebih dahulu kondisi sosial yang mengiringi kritik.

Latar berfungsi untuk memberikan konteks yang membantu pembaca atau pendengar memahami bagaimana suatu peristiwa dibingkai dalam wacana. Latar pada kutipan tersebut menempatkan Feri Amsari sebagai Pihak

yang berada dalam posisi sosial tertentu, yaitu sebagai individu yang tidak hanya menyampaikan kritik namun menerima pelabelan negatif dari publik atau kelompok tertentu. Latar yang dibangun dalam data tersebut menunjukkan bahwa ruang diskusi publik tidak selalu berfokus pada isi kritik yang disampaikan melainkan bisa bergeser fokusnya pada identitas atau karakter pihak pengkritik.

Temuan tersebut sejalan dengan Ratnaningsih (2019) yang mengemukakan bahwa latar merupakan motivasi, hal-hal yang melatarbelakangi penulis untuk menuliskan tulisannya. Latar dapat menjadi pembeda gagasan yang ingin ditekankan juga dapat menjadi pertimbangan dalam mencari maksud yang sebenarnya ingin disampaikan. Latar merupakan dasar yang diambil oleh penulis atau pembicara secara individual dan sosial untuk membangun suatu opini. Menurut Abrams dalam Nurgiyantoro (2017) menyebutkan latar dapat dipahami sebagai dasar yang merujuk pada tempat, hubungan waktu, serta lingkungan sosial di mana suatu peristiwa di ceritakan. Dalam latar sosial Salamah (2024) berpendapat bahwa latar sosial merujuk pada aspek-aspek yang menggambarkan kehidupan sosial masyarakat dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Kehidupan sosial tersebut bersifat kompleks dan mencakup berbagai unsur, seperti kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, serta cara berpikir dan bersikap masyarakat.

Dengan demikian, latar sosial dalam temuan data tersebut terdapat pelabelan "*antek asing*" yang menggambarkan sebagai suatu kondisi sosial

pengkritik dengan memperlihatkan bahwa ruang publik dapat membentuk persepsi tertentu terhadap pengkritik melalui pelabelan atau stigma sosial.

L-2 (8:17-8:20)

“Kerusuhan 2019 ingat kan? Yang berkaitan dengan pemilu yang membakar halte busway dan segala macam.”

L-3 (14:13-14:22)

“Penelitian kami di 2014 menyebutkan Indonesia hanya butuh 21 menteri”

Data L-2 membahas peristiwa kerusuhan tahun 2019 yang terjadi setelah pemilu dan dikaitkan dengan tindakan pembakaran fasilitas publik. Melalui pernyataan “*Kerusuhan 2019 ingat kan?*”, Feri Amsari mengajak audiens mengingat kembali sebuah peristiwa yang pernah menjadi perhatian publik. Pernyataan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengingat atas suatu kejadian masa lalu, tetapi juga digunakan untuk membangun konteks pembahasan mengenai respons pemerintah terhadap aksi massa dan narasi yang berkembang di ruang publik. Data dalam kutipan tersebut memiliki dua latar yang saling berkaitan. Latar pertama adalah peristiwa kerusuhan pascapemilu tahun 2019 yang menjadi konteks historis pembicaraan. Latar kedua adalah pembakaran halte busway yang digunakan sebagai latar tempat atas peristiwa kerusuhan. Selanjutnya, data pada L-3 membahas tentang penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 yang dalam penelitiannya membahas mengenai Indonesia hanya butuh 21 menteri.

Pada temuan data L-2 di atas, latar waktu terlihat pada penyebutan “*kerusuhan 2019*” yang merujuk pada peristiwa tahun 2019 setelah pelaksanaan pemilu. Penyebutan waktu tersebut memberikan efek historis dengan audiens terhadap hubungan pembahasan dengan situasi politik yang

sedang berlangsung pada periode tersebut. Temuan yang sama pada data L-3 yang juga merujuk pada tahun penelitian yang teman-teman dan komunikator lakukan terdapat kutipan "*Penelitian kami di 2014*" merujuk pada tahun dari sebuah data penelitian yang komunikator lakukan untuk memperkuat argumen yang sedang dibicarakan. Penyebutan tahun pada data tersebut juga menjadi gambaran bahwa data yang sedang komunikator bicarakan didukung dengan hasil penelitian yang valid karena sudah dilakukan penelitian pada tahun 2014.

Selanjutnya, pada temuan data L-2 terdapat latar tempat yang terlihat dalam kutipan "*halte busway*" sebagai lokasi yang dikaitkan dengan peristiwa kerusuhan. Penyebutan tempat tersebut memberikan gambaran mengenai ruang terjadinya peristiwa yang sedang dibahas. Komunikator menggunakan lokasi untuk memperjelas konteks kejadian sehingga audiens tidak hanya memahami kapan peristiwa berlangsung, tetapi juga mengetahui ruang sosial yang menjadi bagian dari peristiwa tersebut. Adanya latar tempat tersebut menjadikan pembahasan menjadi nyata serta memperkuat argumen yang sedang dibangun.

Temuan tersebut sejalan dengan Ratnaningsih (2019) yang mengemukakan bahwa latar merupakan motivasi, hal-hal yang melatarbelakangi penulis untuk menuliskan tulisannya. Latar dapat menjadi pembeda gagasan yang ingin ditekankan juga dapat menjadi pertimbangan dalam mencari maksud yang sebenarnya ingin disampaikan. Latar merupakan dasar yang diambil oleh penulis atau pembicara secara individual dan sosial untuk membangun suatu opini. Menurut Abrams

dalam Nurgiyantoro (2017) menyebutkan latar dapat dipahami sebagai dasar yang merujuk pada tempat, hubungan waktu, serta lingkungan sosial di mana suatu peristiwa di ceritakan. Dalam latar waktu dan tempat Salamah (2024) berpendapat bahwa latar waktu berkaitan dengan aspek “ *kapan* ” terjadinya sesuatu yang umumnya dikaitkan dengan waktu faktual atau periode tertentu yang memiliki keterhubungan dengan peristiwa sejarah. Selanjutnya pada latar tempat menunjuk pada di mana peristiwa diceritakan. Tempat-tempat dengan nama atau inisial tertentu atau lokasi tertentu tanpa nama yang jelas dapat menjadi unsur tempat yang digunakan. Latar tempat tersebut berfungsi sebagai konteks bagi cerita, di mana kejadian atau pengalaman tokoh terjadi di tempat dan lingkungan tertentu.

b. Detil

D-1 (9:38-9:45)

“Bukan hanya sekedar 800 ribu rawa kita jadikan sawah, tapi tidak diikuti data. Sawah dimana, provinsi dimana, kabupatennya mana, supaya kita bisa cross check benarkah data itu. Dan itu tidak dilakukan sampai saat ini.”

D-2 (14:13-14:30)

“Penelitian kami di 2014 menyebutkan Indonesia hanya butuh 21 menteri...Amerika punya rata-rata 15 sampai 21 menteri.”

Pada teks di atas dapat dianalisis bahwa pada data D-1 detail yang terlihat merupakan rincian mengenai klaim pemerintah tentang 800 ribu rawa yang dijadikan rawa. Komunikator tidak hanya mempertanyakan angka yang disampaikan, melainkan meminta penjelasan mengenai lokasi, provinsi, dan kabupaten tempat program tersebut dilaksanakan. Penyebutan unsur-unsur

tersebut menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh pemerintah belum cukup untuk dapat diverifikasi oleh publik.

Pada teks di atas dapat dianalisis bahwa pada data D-2 detail yang terlihat yaitu komunikator memperkuat pendapatnya dengan menghadirkan data penelitian yang dilakukan pada tahun 2014. Selanjutnya terdapat penyebutan 21 menteri yang dijadikan sebagai dasar argumentasi. Komunikator menambahkan perbandingan antara Indonesia dengan Amerika mengenai jumlah pengadaan menteri. Temuan tersebut menjadi detail untuk memperjelas wacana terhadap kritik yang disampaikan.

Selanjutnya, penggunaan data perbandingan antarnegara menunjukkan upaya Feri Amsari untuk membangun argumentasi dengan berlandaskan fakta lapangan. Memanfaatkan rincian jumlah kementerian Amerika Serikat sebagai tolak ukur untuk menilai struktur kabinet di Indonesia. Melalui data tersebut, komunikator ingin menunjukkan bahwa ukuran negara yang besar tidak selalu harus diikuti oleh jumlah menteri yang banyak, sehingga penambahan jumlah jabatan dalam kabinet perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan, bukan semata-mata untuk kepentingan politik belaka.

Temuan data di atas sejalan dengan penelitian Rahayu (2022) yang mengemukakan bahwa elemen wacana detil berkaitan dengan cara komunikator mengendalikan dan menyajikan informasi dalam suatu teks. Melalui elemen tersebut, komunikator atau penulis cenderung menguraikan informasi yang dianggap menguntungkan dirinya secara lebih rinci yang berguna untuk memperkuat perspektif yang ingin disampaikan pada khalayak.

Hal yang sama juga terdapat pada penelitian Arifeni et, al. (2024) yang berpendapat bahwa detil dalam aspek semantik berkaitan dengan cara seseorang mengendalikan dan mengatur informasi yang ditampilkan dalam suatu tuturan atau teks.

Dengan demikian, temuan data D-1 mengandung elemen detil berupa permintaan informasi lokasi dan wilayah untuk meminta kejelasan data yang diberikan oleh pemerintah. Sementara D-2 mengandung detil berupa hasil penelitian, angka jumlah menteri, dan perbandingan dengan Amerika Serikat yang digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai struktur kabinet. Sehingga, komunikator dalam membangun kritik lebih kuat, logis, dan berbasiskan data yang ada.

D-3 (4:19-4:28)

“Dari berbagai negara yang menjadi tumpukan hutang negara kita, Singapore, China, Amerika, dan beberapa negara lain. Semuanya berupaya mengambil kekayaan dari negara ini.”

D-4 (5:30-5:40)

“Sebab mereka percaya negara yang lepas dari penjajahan harus punya kakinya sendiri untuk tegak. Itu sebabnya mereka buat kelompok yang lain yang disebut non-blok.”

Pada temuan data di atas, data D-3 dan D-4 menginterpretasikan ketergantungan ekonomi dan posisi politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika global. Pada data D-3, Feri Amsari menjelaskan Narasumber pada data D-3 dan data D-4 menginterpretasikan sebuah fenomena ketergantungan ekonomi dan posisi politik luar negeri Indonesia di tengah konstrain global. Feri Amsari pada data D-3 memaparkan fakta mengenai tumpukan utang luar negeri Indonesia yang berasal dari negara-negara sekutu strategis. Narasumber menilai secara kritis bahwa transaksi utang tersebut membawa

konsekuensi eksploitatif terhadap kekayaan domestik negara. Selanjutnya, Feri Amsari pada data D-4 menguraikan nilai filosofis politik luar negeri dari para pendiri bangsa yang menekankan pentingnya kemandirian nasional melalui prinsip non-blok. narasumber membuktikan bahwa kebijakan pemerintah saat ini cenderung mengalami pergeseran dari cita-cita luhur kemerdekaan akibat beban utang luar negeri yang mengikat.

Berdasarkan elemen detail pada struktur mikro semantik model Teun A. van Dijk, data D-3 dan data D-4 menunjukkan bahwa narasumber menyampaikan rincian informasi untuk memperkuat argumen kritik terhadap pemerintah. Pada data D-3, Feri Amsari tidak hanya menyebutkan adanya utang luar negeri, tetapi juga menjelaskan secara spesifik negara pemberi utang, yaitu Singapura, China, dan Amerika. Penyebutan nama-nama negara tersebut memberikan kesan faktual sehingga audiens memahami bahwa Indonesia memiliki ketergantungan ekonomi terhadap beberapa negara besar.

Pada data D-4, Feri Amsari menjelaskan konsep politik luar negeri melalui frasa "punya kakinya sendiri untuk tegak" dan istilah "non-blok". Narasumber menggunakan kedua istilah tersebut untuk membandingkan cita-cita para pendiri bangsa dengan kondisi kebijakan pemerintah saat ini. Melalui penyampaian rincian tersebut, narasumber membangun argumen bahwa kebijakan pemerintah dinilai telah bergeser dari prinsip kemandirian nasional. Strategi penyampaian detail ini bertujuan untuk memperkuat kritik sekaligus memengaruhi cara pandang audiens terhadap kemandirian pemerintah dalam menjalankan kebijakan negara.

Temuan data di atas sejalan dengan penelitian Safitri (2019) yang mengemukakan bahwa elemen wacana detil berkaitan dengan cara komunikator mengendalikan dan menyajikan informasi dalam suatu teks. Melalui elemen tersebut, komunikator atau penulis cenderung menguraikan informasi yang dianggap menguntungkan dirinya secara lebih rinci yang berguna untuk memperkuat perspektif yang ingin disampaikan pada khalayak. Ratnaningsih (2019) juga mengemukakan bahwa dalam mengekspresikan wacana, pembuat wacana mengekspresikan secara eksplisit melalui detil yang merupakan bagian dari strategi yang menjelaskan fenomena secara lengkap.

c. Maksud

M-1 (14:56-15:15:05)

“Ini menurut saya presiden tidak paham konsep-konsep tanggung jawab seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tidak memahami konstitusi Pak Prabowo.”

M-2 (34:20-34:26)

“Kami tidak mau publik merasa dikhianati. Kami mau bersama publik selamannya.”

Pada temuan data M-1 di atas mengandung maksud bahwa Feri Amsari secara langsung menyampaikan penilaian terhadap kapasitas Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Komunikator menyatakan bahwa Presiden belum memahami secara memadai tanggung jawab konstitusional yang melekat pada jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan tidak hanya ditujukan pada kebijakan tertentu, tetapi juga pada cara Presiden memahami dan menjalankan kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan.

Selanjutnya, Feri Amsari bermaksud menghubungkan berbagai persoalan yang dikritiknya dengan kepemimpinan Presiden sebagai

pengambil keputusan tertinggi. Komunikator menempatkan Presiden sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembentukan kabinet, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan pemerintahan. Melalui pernyataan tersebut, komunikator ingin menunjukkan bahwa berbagai permasalahan yang muncul tidak dapat dilepaskan dari pemahaman Presiden terhadap prinsip-prinsip konstitusi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada temuan data M-2 di atas mengandung maksud bahwa Feri Amsari menegaskan komitmennya untuk tetap berpihak kepada kepentingan publik. Komunikator menyampaikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepercayaan masyarakat. Pernyataan pada data menunjukkan bahwa posisi yang dipilih bukan didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu, melainkan pada upaya menjaga hubungan dan tanggung jawab moral kepada publik. Di sisi lain, Feri Amsari juga bermaksud untuk membangun citra independensi dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan menolak anggapan bahwa kritik yang disampaikan dilatarbelakangi oleh kepentingan politik atau afiliasi dengan kelompok tertentu.

Temuan data di atas sejalan dengan penelitian Rahayu (2022) yang mengemukakan bahwa elemen maksud menunjukkan informasi yang menguntungkan komunikator dan biasanya disampaikan secara eksplisit, jelas, dan terperinci dalam teks. Sebaliknya, informasi yang berpotensi merugikan cenderung disajikan secara implisit atau bahkan disembunyikan. Hal tersebut bertujuan untuk mengarahkan pemahaman khalayak sehingga lebih mudah menerima informasi yang mendukung kepentingan atau sudut

pandang komunikator. Selanjutnya, hal yang sama dikemukakan Ratnaningsih (2019) mengenai maksud dalam suatu teks dapat dianalisis melalui cara penulis menyampaikan informasi kepada pembaca. Informasi yang mendukung kepentingan atau sudut pandang tertentu umumnya disajikan secara eksplisit, jelas, dan tegas, sedangkan informasi yang dianggap merugikan orang lain cenderung disampaikan secara implisit. Oleh karena itu, maksud perlu diperhatikan secara eksplisit dan implisit dalam teks agar pesan yang ingin disampaikan penulis dapat dipahami lebih dalam.

M-3 (31:50-32:10)

“Saya sudah katakan bahwa sedari awal mereka akan kalah. Jadi, kalau saya tahu mereka kalah, **ngapain saya dekat-dekat mereka?** Jadi ini sekali lagi saya merasa orang untuk mematikan substansi. Lain kali menurut saya kepada buzzer **serang poinnya, bantah dengan datanya.**”

M-4 (31:12-31:26)

“Jadi, ini bukan soal kebencian dan suka seseorang. Kalau suka, saya akan perjuangkan prof. Makhfud tapi saya tidak terlibat sama sekali kecuali memberikan saran. Jadi apa baiknya saran? **Masuk tim dan bertemu rutin tidak pernah.**”

Pada temuan data M-3 dan M-4 menginterpretasikan motivasi serta sikap netralnya terhadap tuduhan afiliasi politik setelah pemilu. Pada data M-3, Feri Amsari menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan politik maupun keuntungan pribadi dari pasangan calon yang manapun. Ia menilai bahwa tuduhan kedekatan politik merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari kritik hukum yang disampaikan.

Selanjutnya pada data M-4, Feri Amsari menjelaskan bahwa hubungannya dengan prof. Mahfud hanya sebatas memberikan masukan dalam kapasitas profesional. Narasumber menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya didasarkan pada objektivitas keilmuan, bukan karena kepentingan politik atau keberpihakan terhadap pihak tertentu.

Berdasarkan elemen maksud pada tataran struktur mikro semantik model Teun A. Van Dijk, data M-3 dan M-4 menunjukkan bahwa narasumber menyampaikan informasi secara langsung untuk menegaskan sikap independenya. Pada data M-3, “ngapain saya dekat-dekat dengan mereka?”. Dengan maksud menunjukkan bahwa narasumber menolak anggapan dirinya memiliki kedekatan dengan pasangan calon tertentu. Selanjutnya, narasumber menyampaikan “serang poinnya, bantah dengan datanya” dengan maksud menantang para buzzer penguasa agar diskursus publik beralih dari penyerangan individual menjadi adu argumentasi ilmiah yang berdasarkan data dan fakta di lapangan.

Pada data M-4 Feri Amsari menegaskan, “masuk tim dan bertemu rutin tidak pernah” dengan maksud bahwa narasumber tidak memiliki keterlibatan langsung dengan tim politik tertentu. Penegasan tersebut bertujuan untuk membangun bahwa kritik yang disampaikan bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. melalui maksud tersebut, narasumber berupaya menyakinkan audiens terhadap kritik yang disampaikan didasarkan objektivitas dan integritas akademisi.

Temuan data di atas sejalan dengan penelitian Rahayu (2022) yang mengemukakan bahwa elemen maksud menunjukkan informasi yang menguntungkan komunikator dan biasanya disampaikan secara eksplisit, jelas, dan terperinci dalam teks. Sebaliknya, informasi yang berpotensi merugikan cenderung disajikan secara implisit atau bahkan disembunyikan. Sejalan dengan hal tersebut, Umamy, et al (2022) juga

menjelaskan mengenai elemen maksud yang digunakan untuk melihat teks yang disampaikan secara eksplisit atau tidak mengenai suatu informasi.

d. Praanggapan

P-1 (3:21-3:27)

“Anda juga dicap karena Anda aktivis banyak menyampaikan kritik secara terbuka.”

P-2 (25:54-25:60)

“Karena Anda dekat dengan Pak Anies misalnya”

P-3 (5:24-5:30)

“Mbak Fristian selalu berbicara Non-blok ya, tidak ke barat, tidak ke kutub yang lain”.

Pada temuan data P-1 mengandung praanggapan Moderator yaitu Fristian Griec bahwa Feri Amsari merupakan sosok yang aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah di ruang publik. Moderator menempatkan aktivitas kritik tersebut sebagai fakta yang telah diketahui banyak orang sehingga tidak perlu ada penjelasan kembali. Fokus pembicaraan tidak berfokus pada kritik, melainkan kritik berupa pelabelan negatif terhadap pengkritik. Terdapat pernyataan *“Anda, juga dicap karena anda aktivis banyak menyampaikan kritik secara terbuka”* mengandung praanggapan bahwa Feri Amsari memang aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah dan aktivitas tersebut telah diketahui oleh publik. Pernyataan ini juga mengandaikan bahwa keberadaan cap atau label tertentu merupakan konsekuensi yang muncul akibat kritik yang disampaikan secara terbuka. Moderator tidak lagi mempertanyakan apakah Feri Amsari mengkritik pemerintah atau tidak melainkan hal tersebut sebagai fakta yang sudah diterima dalam pembicaraan.

Pada temuan data P-2 mengandung praanggapan, berupa pengandaian kedekatan Feri Amsari dengan tokoh politik lain yaitu Anies Baswedan. Moderator menggunakan asumsi tersebut sebagai dasar untuk menjelaskan alasan dalam menilai kritik yang disampaikan oleh Feri Amsari. Selanjutnya, pernyataan pada data P-3 mengandung asumsi bahwa hubungan dengan tokoh politik dapat mempengaruhi cara publik memandang kritik terhadap pemerintah. Paraanggapan tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan untuk menilai latar belakang pengkritik sebelum menilai substansi kritik yang disampaikan.

Pada temuan data P-3 mengandung praanggapan narasumber yang menjadi dasar penyampaian argumennya. Praanggapan pertama tampak pada kalimat “Mbak Fristian selalu berbicara Non-blok ya...”. Melalui pernyataan tersebut, narasumber beranggapan bahwa moderator telah memahami dan memiliki pandangan yang sama mengenai konsep politik luar negeri bebas aktif. Selanjutnya, praanggapan kedua terlihat pada frasa “...tidak ke barat, tidak ke kutub yang lain”. Melalui frasa tersebut, narasumber beranggapan bahwa prinsip non-blok mengharuskan Indonesia untuk tidak berpihak kepada salah satu kekuatan dunia. Praanggapan tersebut mengarahkan audiens untuk memahami bahwa keberpihakan terhadap salah satu negara bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia sehingga narasumber tidak perlu menjelaskan kembali makna kemandirian negara secara rinci.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahuel (2018) yang berpendapat bahwa praanggapan merupakan asumsi awal yang dimiliki penutur atau penulis sebelum menyampaikan sesuatu tuturan. Asumsi

tersebut berkaitan dengan pengetahuan, kondisi, atau informasi yang dianggap telah diketahui oleh mitra ututr mengenai topik yang sduah dibicarakan. Selanjutnya pada Nababan mengemukakan bahwa praanggapan ialah asumsi dasar yang melatarbelakangi situasi komunikasi serta penggunaan bahasa tertentu, sehingga struktur bahasa yang digunakan memperoleh makna yang relevan bagi pendengar maupun pembaca (Yulianti, 2024).

Dengan demikian, praanggapan pada temuan data membentuk arah pembicaraan sebelum argumen utama disampaikan. Moderator membangun asumsi bahwa Feri Amsari merupakan pengkritik aktif pemerintah dan memiliki kedekatan dengan tokoh politik tertentu. Asumsi tersebut kemudian ditempatkan sebagai informasi yang dianggap sudah diketahui oleh audiens yang menyebabkan pembahasan tidak berfokus pada isi kritik melainkan bergeser pada identitas, posisi dan hubungan sosial pengkritik.

2. Sintaksis

a. Bentuk Kalimat

BK-1 (6:30-6:6:55)

“Jadi dari tadi, kalau dari tiga poin pertanyaan saya ke Bang Feri. Apakah Bang Feri setuju bahwa saat ini kita bisa membaca pola ketika kritik soal substansi tertentu itu dijawab dengan the messengers yang poinnya adalah menggeser focus publik dari subtansi yang sebenarnya. Itu adalah pola yang berulang yang digunakan menjadi amunisi yang digunakan oleh mereka yang anti terhadap kritik?”

BK-2 (12:22-13:12)

“Bang Feri, apa menurut Anda yang menjadi faktor penyebab misalnya saya menyebut namanya karena dalam konteks pejabatnya, pejabat publik bukan personalnya kita harus kasih disclaimer terlebih dahulu....

Apa yang menyebabkan mereka bisa tampil atau menampilkan dirinya kedepan publik menjawab pertanyaan salah satunya yang disampaikan oleh bang Feri dan para netizen yang sangat kritis dengan pertanyaan demikian. Apa faktornya?.”

Pada temuan data, BK-1 dan BK-2 menunjukkan bentuk tuturan interogatif yang digunakan oleh moderator untuk mempertanyakan beberapa hal kepada narasumber. Pada BK-1 moderator memberi pertanyaan kepada narasumber terkait dengan adanya pola dalam cara kritik terhadap pemerintah yang dibalas dengan pengalihan isu dari substansi ke arah “*the messengers*” atau pengkritik. Moderator menanggapi adanya pola yang dilakukan pemerintah tersebut bertujuan untuk menggeser fokus publik agar tidak berfokus pada isu yang dibahas melainkan bergeser dengan mempertanyakan posisi pengkritik. Selanjutnya pada BK-2 membahas mengenai faktor yang menyebabkan pejabat publik muncul di ruang publik dan memberikan respons terhadap kritik yang disampaikan. Kedua temuan data tersebut mempunyai pola yang sama yaitu menanyakan mengenai isu atau persoalan juga mengarahkan fokus diskusi pada isu tertentu yaitu mengenai pola respons pemerintah terhadap kritik dan faktor kemunculan pejabat dalam merespons kritik publik.

Pada teks diatas dapat dianalisis bahwa pada data BK-1 dan BK-2 menggunakan kalimat interogatif namun,tidak secara langsung menanyakan melainkan memberikan suatu asumsi atau penjelasan terlebih dahulu. BK-1 ditandai dengan penggunaan kata tanya “*apakah*” yang menunjukkan konformasi pada suatu dugaan yang moderator sampaikan yaitu mengenai adanya pola pengalihan isu dari substansi kritik menuju identitas pengkritik.

Bentuk kalimat yang digunakan bukan sekedar untuk menanyakan suatu persoalan tetapi juga mengandung asumsi dari moderator bahwa pola yang ia sampaikan tersebut memang benar terjadi dalam perdebatan publik.

Sementara itu, BK-2 menggunakan kata tanya berupa “*apa*” yang bertujuan untuk meminta penjelasan mengenai faktor penyebab suatu fenomena. Kalimat tersebut disusun secara panjang menunjukkan bahwa pertanyaan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga eksploratif terhadap hubungan antara pejabat publik, kritik dan respons yang diberikan. Susunan pada kalimat interogatif tersebut menjadi sarana untuk memperluas pembahasan dan menggali penjelasan yang lebih dalam dari narasumber.

Kalimat interogatif atau kalimat tanya, sebagaimana dikemukakan oleh Chaer (2009:189) dalam Wulansari et al. (2025), merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk memperoleh jawaban atau respons secara lisan yang berfungsi untuk menanyakan berbagai informasi, seperti apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana. Sejalan dengan itu, menurut Yule (2014:49). Kalimat tanya dalam interaksi verbal dapat mengandung asumsi tertentu yang sudah dianggap benar oleh penutur. Hal tersebut terlihat dalam data BK-1 dan BK-2 yang mencerminkan penggunaan kalimat interogatif sebagai alat eksplorasi yang digunakan moderator kepada narasumber untuk menjelaskan faktor-faktor tertentu dalam dinamika politik.

Dengan demikian, data pada BK-1 dan BK-2 menunjukan bahwa kalimat interogatif dalam wacana politik tidak hanya berfungsi sebagai alat tanya jawab melainkan juga sebagai strategi untuk mengarahkan fokus diskusi.

3. Stilistika

S-1 (10:53-11:10)

“**Main bodoh-bodohan** aja ya, se-elit apa beras amerika dan itu dinikmati lidah orang Indonesia yang paling elit di Indonesia.”

Pada data tersebut, leksikon “*main bodoh-bodohan*” digunakan sebagai bentuk ekspresi sarkastik untuk merespons alasan pemerintah mengenai impor beras Amerika yang diklaim sebagai beras premium atau beras elit. Pilihan kata tersebut menunjukkan bahwa komunikator memandang argumentasi pemerintah sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan sulit diterima secara logis. Kata tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kritik, tetapi juga menjadi penanda ketidakpercayaan terhadap penjelasan yang diberikan pemerintah. Melalui leksikon tersebut, pemerintah direpresentasikan sebagai pihak yang dianggap memberikan alasan yang tidak sesuai dengan realitas kebutuhan masyarakat. Penggunaan diksi yang lugas dan bernada sindiran memperkuat posisi komunikator sebagai pihak yang mempertanyakan kredibilitas argumentasi pemerintah dalam menjelaskan kebijakannya.

Pilihan leksikon “*main bodoh-bodohan*” yang digunakan oleh narasumber pada data S-1 merupakan strategi stilistika yang bersifat dekonstruktif terhadap kredibilitas pemerintah. Secara semantik, kata “bodoh” memiliki makna ketiadaan pengetahuan, kecerdasan, atau nalar. Penggunaan frasa yang digunakan narasumber membongkar ideologi bahwa argumen pemerintah bukan sekedar kesalahan secara teknis melainkan sebuah kesengajaan untuk mengelabui masyarakat. Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis Van Dijk, leksikon menjadi instrumen penting dalam

membangun citra positif maupun negatif terhadap aktor sosial karena pemilihan kata tertentu mencerminkan sikap ideologis komunikator terhadap subjek yang dibicarakan. Sarkasme dalam komunikasi politik berfungsi sebagai sarana kritik yang digunakan untuk mempertanyakan legitimasi kebijakan serta meningkatkan persuasi pesan kepada audiens (Arafi'i, et al. 2023). Dengan mengonsruksikan penjelasan menteri sebagai tindakan “bodoh”, wacana ini secara sadar menggiring opini audiens YouTube untuk meragukan seluruh kompetensi pemerintah dalam mengelola kebijakan pangan nasional.

S-2 (32:25-32:30)

“Pak Jokowi punya masalah dalam Kelola negara kan saya bisa menjilat sebaik-baiknya ya itu **bagian part tololnya saya** menurut teman-temannya saya. **Tolol** kamu nggak memanfaatkan situasi”

Pada kutipan tersebut, leksikon yang paling menonjol adalah kata “*menjilat*” dan “*tolol*”. Kedua kata tersebut dipilih oleh komunikator bukan dalam makna denotatif semata, melainkan sebagai ungkapan yang mengandung penilaian dan kritik sosial. Kata “*menjilat*” digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang memanfaatkan kedekatan dengan penguasa demi memperoleh keuntungan pribadi. Pilihan kata ini memiliki konotasi negatif karena diasosiasikan dengan sikap tidak independen, oportunis, dan mengabaikan prinsip demi kepentingan tertentu. Melalui penggunaan kata tersebut, Feri Amsari ingin menunjukkan bahwa dirinya sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan mendekati kekuasaan, tetapi memilih untuk tidak melakukannya.

Selanjutnya, kata “*tolol*” digunakan secara ironi atau sindiran terhadap dirinya sendiri. Secara harfiah, kata tersebut bermakna tidak cerdas

atau tidak mampu melihat peluang. Namun pada wacana ini, maknanya justru berlawanan. Feri Amsari menggunakan kata tersebut untuk menggambarkan pandangan sebagian orang yang menganggap dirinya tidak memanfaatkan kesempatan yang dapat memberikan keuntungan politik maupun ekonomi. Dengan kata lain, penggunaan leksikon “*tolol*” tidak menunjukkan pengakuan atas kelemahan diri, melainkan menjadi cara untuk mengkritik pola pikir yang mengukur keberhasilan berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan dan kemampuan memperoleh manfaat dari situasi politik yang ada.

Pernyataan “*part tololnya saya*” merupakan bentuk ironi yang diarahkan pada dirinya sendiri. Penggunaan kata “*tolol*” bukan dimaksudkan sebagai pengakuan atas kelemahan diri, melainkan sebagai sindiran terhadap pandangan yang menganggap kesempatan memperoleh jabatan atau akses kekuasaan harus dimanfaatkan demi kepentingan pribadi. Melalui pilihan leksikon ini, komunikator membangun identitas dirinya sebagai pihak yang berusaha mempertahankan independensi dan tidak terlibat dalam praktik politik. Dalam bahasa politik, ironi sering digunakan sebagai strategi retorik untuk menyampaikan kritik secara halus tetapi tetap memiliki daya evaluatif yang kuat karena mampu menunjukkan pertentangan antara nilai ideal dan realitas sosial yang terjadi (Irfansyah, 2023).

S-3 (6:36-6:45)

“...ketika kritik soal substansi tertentu itu dijawab dengan **the messengers** yang poinnya adalah menggeser fokus publik dari substansi yang sebenarnya.”

Pada kutipan tersebut, leksikon pada data S-3 menginterpretasikan pola komunikasi politik yang berkembang dalam ruang diskursus publik pada media digital. Dalam kutipan tersebut terdapat upaya pengalihan isu yang

dilakukan oleh pihak yang tidak menerima kritik untuk mengurangi fokus pada substansi yang dikritik. Terdapat pula konstruksi realitas bahwa ruang digital sering kali tidak siap menghadapi perdebatan yang substantif, sehingga latar belakang pengkritik sering kali menjadi target utama untuk menggeser isi dari substansi kritik.

Berdasarkan elemen stilistika pada struktur mikro, data S-3 menunjukkan penggunaan pilihan kata tertentu untuk menyampaikan pandangan terhadap fenomena yang sedang dibahas. Terdapat istilah “the messengers” yang memiliki arti sang pembawa pesan merujuk pada pihak yang menjadi sasaran serangan dalam perdebatan, seperti aktivis, akademisi, atau pengkritik pemerintah. Pilihan leksikon tersebut menunjukkan bahwa perhatian publik sering dialihkan dari isi kritik kepada latar belakang pengkritik. Selain itu, penggunaan frasa *"dijawab dengan the messengers"* yang dipadukan dengan ungkapan *"menggeser fokus"* memperkuat makna bahwa terdapat upaya mengalihkan pembahasan dari substansi persoalan kritik. Melalui pilihan kata tersebut, menjelaskan kepada audiens bahwa praktik tersebut merupakan bentuk pengalihan isu yang dapat mengaburkan pembahasan berdasarkan data dan fakta.

Sejalan dengan hal tersebut, Ratnaningsih (2019) mengemukakan bahwa leksikon berkaitan erat dengan cara seseorang memilih kata dari berbagai kemungkinan yang tersedia. Melalui kombinasi pilihan kata yang digunakan narasumber bermaksud menjelaskan kepada audiens terhadap praktik pengalihan isu yang mengaburkan nilai esensi perdebatan yang seharusnya berlandaskan data dan fakta.

4. Retoris

R-1 (13:15-13:20)

“Faktornya ada tiga. **Prabowo, Prabowo, Prabowo.**”

R-2 (11:00-11:32)

“Se-elit apa beras amerika dan itu dinikmati lidah orang Indonesia yang paling elit di Indonesia. **Se elit-elitnya lidah di Indonesia, lidah mereka untuk beras lidah kampung. Kalau tidak beras solo, beras jawa barat itu yang wangi-wangi.** Jadi, nggak ada beras amerika yang seelit itu, yang karena alasan itu untuk diimpor ke Indonesia.”

Data R-1 dan R-2 menunjukkan penggunaan strategi retorik yang berfungsi untuk memperkuat pesan kritik yang disampaikan oleh Feri Amsari. Pada data R-1, komunikator menyatakan “*Faktornya ada tiga. Prabowo, Prabowo, Prabowo.*” Sementara itu, pada data R-2 komunikator mempertanyakan alasan impor beras Amerika melalui pernyataan “*Se-elit apa beras Amerika...*” dan membandingkannya dengan preferensi masyarakat Indonesia terhadap beras lokal. Kedua data tersebut sama-sama membahas kritik terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi disampaikan melalui pilihan bahasa yang dirancang untuk memberikan penekanan tertentu kepada audiens. Pada teks di atas dapat dianalisis bahwa pada data R-1 masuk pada aspek retorik bagian repetisi. Komunikator yaitu Feri Amsari mengulang nama “*Prabowo*” sebanyak tiga kali. Pengulangan tersebut digunakan untuk memberikan penekanan yang kuat terhadap pihak yang dianggap sebagai penyebab utama dari persoalan yang sedang dibahas. Feri Amsari menempatkan presiden sebagai pusat perhatian dalam argumentasinya sehingga publik diarahkan untuk memahami bahwa berbagai masalah yang dikritik bermula dari keputusan dan tindakan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Pada teks diatas dapat dianalisis bahwa pada data R-2 masuk pada aspek retorik bagian perbandingan. Pada data tersebut Feri Amsari membandingkan kualitas beras Amerika dengan beras yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Feri Amsari menyampaikan bahwa alasan pemerintah yang menyebut beras Amerika sebagai “beras elit” tidak sesuai dengan realita selera masyarakat Indonesia. Untuk memperkuat argumen, Feri membandingkan beras Amerika dengan beras lokal, seperti beras Solo, dan beras Jawa Barat yang menurutnya lebih sesuai dengan karakteristik dan selera masyarakat Indonesia Melalui perbandingan tersebut, komunikator berusaha menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara alasan yang diberikan pemerintah dan kondisi yang dipahami oleh masyarakat.

Komunikator yaitu Feri Amsari menggunakan perbandingan tersebut untuk mempertanyakan alasan kebijakan impor beras dari amerika tersebut. Penggunaan perbandingan antara beras impor dengan beras lokal tersebut sebagai penguat argumen yang disampaikan agar pemerintah dapat memberikan alasan yang lebih akurat mengenai kebijakan impor beras tersebut.

Temuan data di atas sejalan dengan penelitian Rahayu (2022) yang mengemukakan bahwa retorik merupakan strategi wacana berkaitan dengan gaya bahasa yang digunakan penutur atau penulis dalam menyampaikan pesan. Retorik berfungsi untuk meningkatkan daya persuasi suatu tuturan atau teks, sehingga pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi cara pandang dan pemahaman khalayak. Imam (dalam Putri et al., 2023) menjelaskan bahwa retorik merupakan unsur yang berkaitan dengan gaya penekanan dalam

penyampaian suatu topik di dalam teks. Unsur tersebut berfungsi untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan penulis melalui penggunaan berbagai gaya bahasa seperti hiperbola, repetisi, aliterasi maupun bentuk penekanan lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Dijk (1986:81) yang menjelaskan bahwa aspek retorik dalam suatu wacana merujuk pada cara yang digunakan oleh penutur atau penulis untuk memberikan penekanan pada unsur-unsur tertentu yang ingin ditonjolkan dalam teks (Darma, 2013). Melalui strategi retorik, penulis dapat mengarahkan perhatian pembaca terhadap gagasan yang dianggap penting. Oleh karena itu aspek retorik memiliki pengaruh terhadap struktur teks karena berperan dalam menentukan informasi atau pesan yang diperoleh melalui penekanan utama dalam suatu wacana.

R-3 (13:15-13:20)

“...sehingga lebih mirip menjadi **blok yang go.**”

R-4 (11:00-11:32)

“Latihannya kapan maksudnya?”

Data R-3 dan R-4 menunjukkan penggunaan strategi retorik yang menginterpretasikan adanya penurunan prinsip kedaulatan negara dan lemahnya narasi penegakan hukum pemerintah. Pada data R-3, Feri Amsari mengkritik arah politik luar negeri Indonesia yang dinilai tidak lagi mencerminkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Selanjutnya, pada data R-4, Feri Amsari mempertanyakan dasar tuduhan aparat keamanan yang menyatakan bahwa mahasiswa terlibat dalam aksi pembakaran fasilitas publik. Melalui kedua data tersebut, narasumber menunjukkan bahwa argumen yang disampaikan oleh institusi negara masih mengandung beberapa

kejanggalan sehingga perlu didukung dengan bukti yang sesuai dengan fakta di lapangan.

Berdasarkan aspek retorik pada struktur mikro model Teun A. van Dijk, data pada R-3 dan R-4 menunjukkan bahwa narasumber menggunakan gaya bahasa tertentu untuk memberikan penekanan terhadap kritik yang disampaikan. Pada data R-3, Feri Amsari menggunakan gaya bahasa ironi melalui pelesetan istilah "non-blok" menjadi "blok yang go". Pelesetan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai permainan kata, tetapi juga sebagai bentuk kritik terhadap arah politik luar negeri Indonesia. Melalui ungkapan tersebut, narasumber menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah dinilai tidak lagi mencerminkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif karena dianggap lebih mengikuti kepentingan negara lain. Penggunaan gaya bahasa ini memberikan penekanan terhadap kritik yang disampaikan sehingga audiens lebih mudah memahami pandangan narasumber mengenai perubahan arah politik luar negeri Indonesia.

Pada data R-4, Feri Amsari menggunakan kalimat tanya "Latihannya kapan maksudnya?" sebagai bentuk pertanyaan retorik. Pertanyaan tersebut tidak bertujuan untuk memperoleh jawaban, tetapi digunakan untuk mempertanyakan logika dari tuduhan bahwa mahasiswa mampu melakukan pembakaran gedung DPRD dalam waktu yang singkat. Melalui pertanyaan tersebut, narasumber menunjukkan keraguannya terhadap narasi yang disampaikan oleh aparat keamanan. Penggunaan pertanyaan retorik ini memberikan penekanan pada kritik yang disampaikan sehingga audiens

terdorong untuk menilai kembali kebenaran informasi yang beredar dan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan fakta di lapangan.

Temuan data di atas sejalan dengan penelitian Rahayu (2022) yang mengemukakan bahwa retorika merupakan strategi wacana berkaitan dengan gaya bahasa yang digunakan penutur atau penulis dalam menyampaikan pesan. Relevansi fungsi retorika tersebut diperkuat oleh pendapat Eriyanto (2001) yang menyatakan bahwa unsur-unsur retorika dalam analisis wacana berfungsi sebagai strategi untuk menonjolkan makna tertentu, mengarahkan perhatian khalayak, serta membentuk cara audiens memaknai tentang suatu realitas. Melalui penggunaan strategi retorika tersebut, narasumber menggiring opini audiens sehingga fokus pembahasan bergeser dari data dan fakta menuju penilaian terhadap individu yang menyampaikan kritik.

D. Analisis Konteks Sosial pada Tayangan YouTube *Feri Amsari kritik Pemerintah*

Teun A. van Dijk menegaskan bahwa analisis wacana kritis tidak dapat dilepaskan dari relasi timbal balik antara teks dan struktur kehidupan sosial masyarakat. Konteks sosial tersebut memengaruhi bagaimana sebuah wacana diproduksi, disebarkan, dan ditafsirkan di ruang publik. Untuk membedah bagaimana konstruksi pemerintah dibangun dalam tayangan YouTube ini, peneliti membagi analisis konteks sosial ke dalam dua aspek utama, yaitu konteks sosial kekuasaan (*power*) dan konteks sosial akses (*access*).

1. Konteks Sosial Kekuasaan

Konteks sosial kekuasaan dalam tayangan “*Feri Amsari kritik pemerintah: Independen atau ada kepentingan?*”, konstruksi pemerintah dibangun melalui berbagai kritik yang diarahkan pada cara pemerintah dibangun melalui berbagai kritik yang diarahkan pada cara pemerintah merespons kritik publik, mengelola kebijakan, menjalankan pemerintahan, serta hubungan dengan masyarakat. Wacana tersebut tidak muncul dalam ruang yang netral, melainkan berada dalam wacana politik Indonesia pascapemilu 2024 yang ditandai oleh meningkatnya polarisasi politik, perdebatan mengenai kualitas demokrasi, dan menguatnya kritik terhadap tata kelola pemerintahan.

Aktor yang terlibat dalam wacana meliputi pemerintah sebagai pihak yang menjadi sasaran kritik, dan Feri Amsari sebagai akademisi yang menyampaikan pandangan kritisnya untuk mengkritisi pemerintah, serta masyarakat yang menjadi penerima sekaligus penafsir pesan yang disampaikan. Pada tayangan tersebut, Feri Amsari menyinggung berbagai pelabelan seperti “*antek asing*”, “*pembenci pemerintah*”, dan dugaan kedekatan dengan tokoh politik tertentu yang menyebabkan perdebatan publik tidak hanya berfokus pada isi kritik kepada pemerintah melainkan pada identitas pihak yang menyampaikan kritik.

Konteks sosial dalam tayangan *Feri Amsari Kritik Pemerintah: Independen atau Ada Kepentingan?* tidak dapat dilepaskan dari situasi politik Indonesia pasca-Pemilu 2024 dan awal pemerintahan Presiden Prabowo

Subianto. Pada periode tersebut, ruang publik diwarnai oleh berbagai perdebatan mengenai arah kebijakan pemerintah, pembentukan kabinet, transparansi tata kelola pemerintahan, serta keberlanjutan praktik demokrasi di Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, kritik yang disampaikan oleh akademisi, aktivis, maupun kelompok masyarakat sipil menjadi semakin menonjol karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, bersamaan dengan itu, muncul pula kecenderungan untuk mengaitkan kritik dengan afiliasi politik tertentu sehingga kritik tidak selalu dipahami sebagai bagian dari pengawasan demokratis, melainkan sering dipersepsikan sebagai bentuk oposisi politik terhadap pemerintah.

Kondisi tersebut terlihat dari cara kritik terhadap kebijakan impor beras, penyusunan kabinet, dan transparansi data pemerintah dibahas melalui argumentasi Feri Amsari. Pembahasan mengenai kebijakan sering kali bergeser menjadi perdebatan mengenai latar belakang dan kepentingan pihak yang menyampaikan kritik. Dalam perspektif Van Dijk, keadaan tersebut menunjukkan bahwa wacana politik dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang berperan dalam membentuk opini publik (Darma, 2013). Akibatnya, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada substansi kritik, tetapi juga pada identitas sosial dan afiliasi politik pengkritik.

Crystal (dalam Darma, 2013:43) mengemukakan bahwa bahasa bertujuan untuk mengungkapkan hubungan kekuasaan dengan proses-proses ideologis yang muncul dalam teks-teks lisan maupun tulisan. Dalam tayangan tersebut dikaitkan dengan adanya ketidakpercayaan publik terhadap

transparansi pemerintah. Seperti adanya impor beras dan kebijakan mendadak menjadi realitas sosial yang digambarkan narasumber sebagai representasi lemahnya sistem pemerintahan.

Selanjutnya relasi kuasa juga tampak pada bagaimana kritik publik diposisikan dalam ruang demokrasi. Beberapa bagian tayangan menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak selalu direspons melalui perdebatan substansi, tetapi sering kali dihubungkan dengan identitas, afiliasi politik, atau latar belakang pengkritik. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan kelompok yang mendukungnya memiliki posisi yang lebih kuat dalam membentuk narasi publik mengenai kritik yang muncul. Akibatnya, masyarakat sipil tidak hanya berhadapan dengan kebijakan yang ingin dikritisi, tetapi juga harus menghadapi upaya-upaya yang dapat menggeser fokus pembahasan dari substansi kritik menuju persoalan personal.

Konteks sosial lain yang turut mengkonstruksi pemerintah yaitu mengenai tata kelola pemerintah serta pengisian jabatan dalam pemerintahan. Terdapat pernyataan mengenai “*hutang jasa*” dan “ditarik “*masuk pemerintahan*” membangun konstruksi bahwa pengisian jabatan pada pemerintahan tidak sepenuhnya didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme namun dipengaruhi oleh kepentingan politik. Isu patronase politik tersebut menjadi pembicaraan oleh publik karena dianggap dapat mempengaruhi efektivitas pemerintahan.

2. Konteks Sosial Akses

Konteks sosial akses merujuk pada kesempatan, keterlibatan, dan kemampuan kontrol yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap media komunikasi untuk menentukan representasi wacana di lingkungan sosial. Feri Amsari berbicara mengenai kritik terhadap pemerintah dalam sebuah konteks sosial di mana media digital baru kini tumbuh populer sebagai ruang demokrasi publik alternatif. YouTube tidak lagi berfungsi sebagai media hiburan sekadar pengisi waktu luang, melainkan telah bertransformasi menjadi wadah interaktif bagi masyarakat untuk memantau, mengamati, dan menguji praktik kekuasaan para elite melalui perdebatan politik.

Feri Amsari berbicara tentang kritik pemerintah dalam konteks sosial saat media digital semakin populer sebagai tempat untuk demokrasi publik. YouTube tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga menjadi tempat di mana masyarakat dapat mengamati kekuasaan melalui perdebatan politik. Menurut Takiddin, et al. (2023) media massa sangat penting untuk mendukung demokrasi karena memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Media massa juga membantu pemilih membuat keputusan yang bijak serta berguna untuk mengawasi atau memantau tindakan pemerintah.

Tayangan tersebut menampilkan Feri Amsari sebagai representasi kelompok akademisi dan masyarakat sipil yang berusaha mengambil kontrol atas kekuasaan. Menurut Habermas (dalam Darma, 2013:53) mengemukakan pendapatnya bahwa AWK bertujuan untuk membantu menganalisis dan memahami masalah sosial dalam hubungannya antar ideologi dan kekuasaan. Dalam hal ini mengenai kritik publik yang merupakan bagian penting dari

demokrasi yang berdasarkan hasil musyawarah karena memungkinkan pengawasan negara. Namun, dalam kenyataannya, kritik sering berhadapan dengan kekuatan politik yang lebih berkuasa, sehingga menyebabkan konflik wacana antara masyarakat kritis dengan para elit pemerintah.